

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Masalah	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	13

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KARAKTERISTIK PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	15
2.1. Konstruksi Hukum Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi	15
2.2. Kualifikasi Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik	21
BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERHADAP EKSISTENSI PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK	27
3.1. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/Puu-Xvii/2019	27
3.2. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 Terhadap Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Tindak Pidana Korupsi	32
3.2.1. Keberlakuan Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019.....	33
3.2.2. Mekanisme Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:56/PUUXVII/2019.....	37
BAB IV PENUTUP	44

4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	45
DAFTAR BACAAN	46